DAFTAR PUSTAKA

Adriawan, R., Putri, D. A., & Santoso, B. (2022). Pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 21(2), 145–158.

Al-Qur'an dan terjemahannya Kementerian Agama Republik indonesia- 2019

Afiah, N. N., Rahmatika, D. N., & Pratama, A. (2020). Akuntansi pemerintahan daerah. Salemba Empat.

Ahyani, W. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(2), 145–160.

Alisman, & Sufriadi. (2020). Desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 11(1), 55–68.

Arikunto, S. (2016). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (E. revisi (ed.)). Rineka Cipta.

Bahasoan, A. (2024). Otonomi daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 45–60.

Bargain, O. (2023). Fiscal decentralization and local revenue capacity. Journal of Public Economics

Bastian, I. (2019). Akuntansi sektor publik (E. terbaru (ed.)). Andi.

Carunia, M. F. (2017). Pengelolaan pendapatan asli daerah. Mitra Wacana Media.

Defitri, S. Y., Putri, A. A., & Rahmawati, D. (2021). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio efektivitas dan efisiensi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 6(2), 89–103.

Dekhtyar, N., Hryhoriv, O., & Petrova, I. (2020). Fiscal decentralization and strengthening local government financial capacity. Public Policy and Administration

Dewanto, A. (2024). Akuntansi sektor publik. Penerbit [isi sesuai buku aslinya].

Fahriza, M., & Riswati, R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik), 10(2), 158–172. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3732

Febrianti, A. A., & Fidiana. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Aloaksi Umum, Dan Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 14(1), 1–18.

Firdausy, C. M. (2017). Optimalisasi kebijakan fiskal daerah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Halim, A. (2021). Akuntansi keuangan daerah.

Haslam McKenzie, F., & Eyles, K. (2024). Fiscal capacity and local government autonomy in

Australia. Australian Journal of Public Administration, 83(2), 210–225. https://doi.org/10

Indonesia, K. K. R. (2023). Laporan transfer ke daerah dan dana desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Indonesia, R. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Khusaini, M. (2018). Manajemen keuangan daerah. Universitas Brawijaya Press.

Krismayanti, D. (2022). Kemandirian keuangan daerah dalam perspektif desentralisasi fiskal. Jurnal Keuangan Daerah, 10(2), 101–115.

_____. M. (2022). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah yang Dikaitkan dengan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kota Baubau Tahun Anggaran 2017-2021. JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial, 1(01), 39–47.

Lantowa, F. (2024). Pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 10(2), 45–56.

Lazarus, V. S. (2024). Pengelolaan pendapatan asli daerah dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Universitas/Institusi Terkait.

Malau, H., & Simarmata, R. (2020). Pendapatan asli daerah sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Jurnal Keuangan Dan Pembangunan Daerah, 8(2), 85–98.

Mamonto, R. (2020). Dana perimbangan sebagai instrumen pendukung pelaksanaan otonomi daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 5(2), 88–102.

Mardiasmo. (2016). Desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Andi.

_____. (2018a). Akuntansi sektor publik. ANDI

_____. (2018b). Otonomi dan manajemen keuangan daerah.

Marhamah, M., & Harsono, I. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023. JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 6(3), 349–360. https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.699

Marsudi, & Widjaja, A. (2019). Analisis kemandirian keuangan daerah dan implikasinya terhadap belanja daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 14(1), 1–15.

Muhardinata, D. (2022). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemiskinan. Jurnal Ekonomi Regional, 14(1), 60–74.

Muliana, Said, M., & Bakar, A. (2021). Konsep kemandirian keuangan daerah. In Manajemen keuangan daerah (pp. 85–102). Penerbit Fakultas Ekonomi.

Mulyanto, A., & dkk. (2024). Akuntansi sektor publik. Universitas Mitra Indonesia.

Nurlinda. (2021). Akuntansi sektor publik.

Nurzen, A., & Riharjo, I. B. (2016). Analisis pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(7), 1–17.

Oktavia, R., & Handayani, S. (2021). Analisis tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan pendapatan asli daerah dan dana transfer. Jurnal Keuangan Dan Kebijakan Publik, 12(2), 85–98.

Pandjaitan, J. R., Sinaga, B. M., & Manurung, A. H. (2018). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Jurnal Keuangan Daerah, 5(1), 1–15.

Pane, A., Siregar, H., & Nasution, M. (2021). Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan keuangan daerah. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 12(3), 201–214.

____. Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 5(2), 31–44. https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3182

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005).

Pramudiati, N. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap Kinerja Keuangan Pemda dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Syntax Transformation, 2(6), 1–51.

_____. R. (2022). Pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 8(2), 75–88.

Rahman, (2024). Akuntansi keuangan sektor publik. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Ratmono, D., & Darsono. (2022). Agency theory dalam sektor publik: Konsep dan implementasi pengelolaan keuangan pemerintah. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Said, & Bakar. (2021). Keuangan daerah dan kemandirian fiskal.

Saleh, M. (2020). Kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan terhadap dana transfer. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 11(2), 145–158.

Shahidi, F., Hosseini, M., & Rezaei, R. (2019). Public service delivery and fiscal decentralization: Evidence from local governments. Journal of Public Administration Research and Theory, 29(3), 345–362. https://doi.org/10.1093/jopart/muy018

Sitepu, & dkk. (2024). Akuntansi publik/sektor publik

.

Statistik, B. P. (2019). Statistik keuangan pemerintah daerah. Badan Pusat Statistik.

Suandi. (2016). Transfer fiskal dan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 21–34.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi revi). Alfabeta.

Sukanto, S., Wibowo, A., & Prasetyo, H. (2018). Pengaruh dana transfer terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 19(3), 210–224.

Supardan. (2020). Pengelolaan keuangan daerah. Alfabeta.

Supit, M. A., & Lumingkewas, F. S. (2023). Keuangan daerah dan pengelolaannya. Deepublish.

Susanti, E., Siregar, H., & Nasution, M. (2016). Pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 7(2), 101–115.

Umasangadji, U. (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu), 4(1), 64–71. https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i1.6514

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah (2003).

Wirono. (2022). Akuntansi pemerintahan daerah. Rajawali Pers.

Hildawati, H., & dkk. (2024). Kerangka teoritis dalam penelitian ilmiah: Konsep, fungsi, dan penerapannya. Jurnal Ilmiah Penelitian Sosial, 9(1), 45–58.